

**MENGEMBANGKAN TATA KELOLA SUMBERDAYA PARIWISATA
INTERAKTIF BERBASIS *INSTITUTIONAL ANALYSIS DEVELOPMENT*
(IAD) UNTUK Mendukung Pengembangan Pariwisata Ramah
Masyarakat Adat**

(Tesis)

**Oleh
Rahmat Sanjaya
2026061008**



**PASCA SARJANA ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**MENGEMBANGKAN TATA KELOLA SUMBERDAYA PARIWISATA
INTERAKTIF BERBASIS *INSTITUTIONAL ANALYSIS DEVELOPMENT*
(IAD) UNTUK Mendukung Pengembangan Pariwisata Ramah
Masyarakat Adat**

Oleh
Rahmat Sanjaya
2026061008

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

Pada
Program Pasca Sarjana
Jurusan Magister Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



PASCA SARJANA ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRACT

The governance of shared tourism resources has previously been criticized for neglecting the rights of indigenous peoples and local knowledge in maintaining and developing the tourism economy and environment. The resource governance policy process is structured using mono factor analysis, institutional functions do not work. This is not in accordance with the sustainable tourism development platform. The impact is that conflicts arise over the use of resources, resulting in failure to improve welfare, justice for local indigenous communities and weaken the sustainability of tourism development. Therefore, changes in interactive governance are needed to support the success of tourism development. Institutional analysis development (IAD) is an interactive governance framework chosen to obtain key success factors for the management of tourism resources. The main focus is the policy-making process that prioritizes indigenous peoples and the working of institutional functions. The effectiveness can be seen from the analytical framework using multi factors, very easily adapted to different contexts, integrating contextual factors that occur in the field, so that policies are the result of institutional relations between various knowledge, expertise and policy making through new coalitions with indigenous communities. Efforts to position indigenous peoples who are politically weak in policy making will be able to overcome conflicts over tourism resources, as well as foster social capital of indigenous peoples' trust. The research formulates the problem of key/contextual factors that support the successful development of interactive tourism resource management within the IAD framework. The specific objectives of the research are: to develop an IAD-based interactive tourism resource governance model to support indigenous peoples-friendly tourism development. PRA is used as a method to explore new findings using need assessment and prospective analysis. The research results contribute to national development priorities, namely tourism development.

KEY WORDS : *Governance, tourism resources, institutional and adaptive, indigenous peoples, tourism development*

ABSTRAK

Tatakelola sumberdaya pariwisata bersama sebelumnya dikritik dikarenakan pengabaian hak-hak masyarakat adat dan pengetahuan local dalam memelihara dan mengembangkan ekonomi dan lingkungan pariwisata. Proses kebijakan tatakelola sumberdaya disusun menggunakan analisis mono factor, fungsi-fungsi institusi tidak bekerja. Hal ini tidak sesuai *platform* pengembangan pariwisata berkelanjutan. **Dampak**, muncul konflik pemanfaatan sumberdaya, mengakibatkan gagal meningkatkan kesejahteraan, keadilan bagi komunitas local adat dan melemahkan keberlanjutan pengembangan pariwisata. Oleh karenanya diperlukan perubahan tata kelola interaktif untuk mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata. **Institutional analysis development (IAD)** merupakan kerangka tatakelola interaktif yang dipilih untuk mendapatkan factor kunci keberhasilan tatakelola sumber daya pariwisata. Fokus utamanya adalah proses pembuatan kebijakan mengedepankan masyarakat adat dan bekerjanya fungsi-fungsi institusional. Keefektifan terlihat dari kerangka analisis menggunakan multi factor, sangat mudah disesuaikan dengan berbagai konteks yang berbeda, mengintegrasikan factor-faktor kontekstual yang terjadi di lapangan, sehingga kebijakan merupakan hasil hubungan institusional antara berbagai *pengetahuan, keahlian dan pembuatan kebijakan* melalui koalisi baru bersama komunitas adat. Upaya untuk mendudukan masyarakat adat yang lemah secara politik dalam pembuatan kebijakan akan dapat mengatasi konflik sumberdaya pariwisata, sekaligus menumbuhkan modal sosial- *trust* masyarakat adat. **Penelitian merumuskan permasalahan** faktor-faktor kunci/konstekstual yang mendukung keberhasilan pengembangan tatakelola sumberdaya pariwisata interaktif dalam kerangka IAD. **Tujuan khusus penelitian** adalah: mengembangkan model tata kelola sumberdaya pariwisata interaktif berbasis IAD untuk mendukung pengembangan pariwisata yang ramah masyarakat adat. **PRA** digunakan sebagai metode untuk mengeksplorasi temuan baru menggunakan analisis *need assessment* dan *prospektif*. Hasil penelitian berkontribusi **prioritas pembangunan nasional** yaitu pengembangan pariwisata.

KATA KUNCI : Governance/tatakelola, sumberdaya pariwisata, institusional dan adaptif, masyarakat adat, pengembangan pariwisata

Judul : **MENGEMBANGKAN TATA KELOLA SUMBERDAYA PARIWISATA INTERAKTIF BERBASIS INSTITUTIONAL ANALYSIS DEVELOPMENT (IAD) UNTUK Mendukung Pengembangan Pariwisata Ramah Masyarakat ADAT**
Nama Mahasiswa : **RAHMAT SANJAYA**
No Pokok Mahasiswa : **2026061008**
Jurusan : **Administrasi Negara**
Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

NIP. 19691103 200212 2 002

Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si.

NIP. 19720918 200212 2 002

**2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Dr. Supto, S.Sos., M.A.B

NIP. 19690226 199903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.



Sekretaris : Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si.



Penguji Utama : Intan Fitria Meutia, M.A., Ph.D



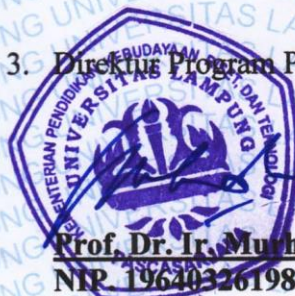
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001



3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 03 Agustus 2023

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Megister/Sarjana/Ahli Madya). Baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2023



Rahmat Sanjaya
RAHMAT SANJAYA

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rahmat Sanjaya dilahirkan di Panaragan, pada tanggal 07 Juni 1996, merupakan anak ke3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Khoiri Rujungan dan Ibu Rekayanti, S.Pd Jenjang Pendidikan penulis di mulai dari Taman Kanak-kanak Pertiwi di Panaragan, diselsaikan pada tahun 2002 Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar yaitu di SDN 02 Panaragan, diselesaikan pada tahun 2008 Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Karya Bahkti dan diselesaikan pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 02 Tumijajar dan diselesaikan pada tahun 2014 Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiwa, pengalaman organisasi penulis yaitu Ketua Angkatan BEM Garda Muda FISIP UNILA tahun 2014-2015 serta Ketua Pelaksana Promosi Jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2016 dan dilanjutkan sebagai Kordinator Kecamatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung tahun 2017 di Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan Lambu Kibang, serta menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung (HMI KOMSOSPOL UNILA) tahun 2015.

MOTTO

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289).

PERSEMBAHAN

**Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT dan segala
Ketulusan hati, ku persembahkan karya sederhana ini sebagai
tanda bakti dan cinta kasihku kepada :**

**Kedua orangtua tercinta mamah dan papah,
atas segala kasih sayang, do'a, dan perjuangan untuk
keberhasilanku.**

**Keluargaku, Teman-Temanku Semua atas dukungan dan kesabarannya
yang telah menemani dan membantuku
dalam penyusunan Tesis ini**

**Almamater tercinta
Universitas Lampung**

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Mengembangkan Tata Kelola Sumberdaya Pariwisata Interaktif Berbasis Iad Untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Ramah Masyarakat Adat."**

Selama proses penyusunan Tesis penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki maka, selama penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membimbing dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si., yang telah membantu dan terus memotivasi agar menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Intan Fitria Meutia, M.A., Ph.D selaku dosen penguji. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan serta masukan, saran dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan

4. Teristimewa untuk kedua orang tua ku Papah (Khoiri Rujungan), Mamah (Rekayanti,S.Pd) seluruh keluarga ku Ginda (Ria Putri Sanjaya, S.K.M), Gusti (Prasaputra Sanjaya,S.I.P), Sembahan (Weni Sagita Riski Duwiyanti,S.Keb), keponakan Pakmaman Bos Jejen (Rajendra Rujungan), Adin Ai (Syailendra Almortaza) yang selalu memberikan doa di setiap tetes keringatmu demi tercapainya kesuksesanku.

Penulis hanya dapat berdoa, semoga segala bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai amal baik dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis

Rahmat Sanjaya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Model Kebijakan Tatakelola Sumberdaya	12
2.2.1 Pengertian	12
2.2.2 Prinsip-Prinsip	14
2.3 Institutional analysis development (IAD)	16
2.4 Pariwisata Yang Ramah Masyarakat Adat	20
2.5 Kerangka Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Subjek dan Lokasi	24
3.3 Instrumen Penelitian	24
3.4 Tehnik Analisis Penelitian	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Wilayah Penelitian	28
4.1.1 Kondisi Geografis	28
4.1.2 Potensi Pertanian	32
4.1.3 Potensi Perikanan	33
4.1.5 Potensi Pariwisata	33
4.2 Identifikasi Faktor-Faktor Tatakelola Pariwisata Berbasis IAD	35
4.2.1 Deskripsi Faktor Eksogeneus	35
4.2.2 Deskripsi Faktor arena aksi	38
4.2.3 Deskripsi dampak (kinerja dan Kerjasama)	42
4.3 Analisis Data	48
4.3.1 Analisis Prospektif : Faktor Kunci	48
4.3.2 Analisis need Assesment dan Stakeholders Grid	51
4.3.3 Mengembangkan Model Tatakelola Sumberdaya Pariwisata Interaktif dan Strategi Implementasi	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tatakelola sumberdaya bersama pariwisata *integrative* memungkinkan peran serta beragam stakeholders, termasuk masyarakat adat dalam pemanfaatan sumberdaya pariwisata secara lebih adil, dapat membangun ketahanan, kemampuan beradaptasi dan mengelola resiko di masa depan (Ram, 2022).

Isu Tatakelola sumberdaya bersama pariwisata berkaitan dengan pengabaian hak-hak masyarakat adat, dimana sejak puluhan tahun sebelumnya, masyarakat adat tumbuh, memelihara dan mengembangkan ekonomi dan lingkungan pariwisata, namun hal itu diabaikan dalam proses kebijakan, termasuk implementasinya (Dewa Mangku, 2022). Pengetahuan yang digunakan dan cara pandang pemerintah dalam proses kebijakan jauh dari platform keberlanjutan (Noverman, 2020). Beberapa atribut yang dikembangkan pemerintah berkaitan dengan keberadaan masyarakat local yang tidak dapat mendatangkan nilai tambah, *bias* sikap pemerintah terhadap masyarakat adat yang mendua, di satu sisi selalu ditampilkan sebagai ciri khas keberagaman NKRI, namun di sisi lain selalu dianggap terbelakang, dan disubordinatkan dalam pembangunan (Falk,2019). Dampak, muncul konflik pemanfaatan sumberdaya mengakibatkan gagal meningkatkan kesejahteraan, keadilan

bagi komunitas local adat dan melemahkan keberlanjutan pengembangan pariwisata. Studi tentang konflik yang dilakukan beberapa peneliti mengatakan pariwisata sering berhadapan dengan komunitas masyarakat adat, dalam keadaan populasi dan kekuatannya meningkat, pariwisata menjadi kalah dan terpinggirkan (Tresiana,2019). Masyarakat adat telah lama mengembangkan ekonomi dan lingkungan melalui penguasaan sumberdaya pariwisata dengan kondisi benar salah yang semakin kabur. Hal ini semakin berkembang menjadi arena perebutan dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku, perspektif, ragam baik skala internal komunitas maupun dengan pemerintah dan swasta. Oleh karenanya hal ini memerlukan penanganan, salah satunya perbaikan proses kebijakan holistic integrative, dengan analisis pengembangan kelembagaan (IAD).

Institutional analysis development (IAD) merupakan kerangka baru tatakelola sumber daya pariwisata dengan pendekatan multi-faktor, model analisis dan pengembangan kelembagaan (Ortiz Romalo,2023). Berbagai faktor-faktor kompleks menggunakan kerangka sebelumnya kurang memuaskan, dikarenakan analisis menggunakan pendekatan tunggal (monodisiplin). Model ini dipilih, karena sangat mudah disesuaikan dengan berbagai konteks yang berbeda, mengintegrasikan factor-faktor kontekstual yang terjadi di lapangan. Kerangka berkontribusi membangun hubungan institusional antara pengetahuan lokal, keahlian dan pembuatan kebijakan melalui koalisi baru bersama komunitas adat (Gyan, Surya, 2022). Upaya untuk mendudukkan masyarakat adat yang

lemah secara politik dalam pembuatan kebijakan menjadi factor kunci untuk mengatasi konflik sumberdaya pariwisata, sekaligus menumbuhkan modal sosial dan trust masyarakat adat (Rahman,2021). Studi Tresiana dkk (2021), menggambarkan pengaturan kelembagaan adat yang lentur, adaptif dapat menjadi kelembagaan penghubung perubahan dan inovasi dalam proses kebijakan. Sementara studi terbaru berkaitan dengan perumus kebijakan/aktor (Ana,2022), *local knowledge* (Beny,2022), dan *advocacy* kebijakan (Jonathan,2020), dorongan institusi yang tidak spesifik, hubungan dan interaksi multi aktor dan multi factor dalam perumusan kebijakan dapat menciptakan efisiensi ekonomi, kesetaraan fiskal, pemerataan redistribusi, akuntabilitas, kesesuaian dengan moralitas umum dan kemampuan beradaptasi (Jonathan,2020). Perubahan tatakelola sumberdaya melalui bekerjanya fungsi-fungsi institusi merupakan platform baru dalam mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata.

Penelitian di lakukan di Tulang Bawang Barat. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Way Kenanga, Kecamatan Pagar Dewa, dan Kecamatan Batu Putih dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 1.201,1$ km².

Pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan Pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang kegiatannya diselenggarakan oleh pemerintah. Dinas Pariwisata telah melaksanakan berbagai usaha agar mengatasi permasalahan yang kerap kali menjadi penghambat dalam pengembangan wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berbagai macam ilmu pengetahuan tentu saja juga diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun dibutuhkan utama adalah aparatur yang dapat memberikan dorongan dan juga motivasi dalam pengelolaan pariwisata oleh karena itu kebutuhan akan aparatur yang mempunyai keterampilan dan latar belakang dalam bidang pariwisata sangatlah penting. Kesadaran akan pentingnya sumber daya aparatur yang berkemampuan khusus dibidang pariwisata tentu apabila diperhatikan maka akan sangat berdampak positif terhadap pengelolaan kepariwisataan di Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana masyarakat adat sebagai subyek pembangunan terlibat dalam setiap proses kebijakan melalui bekerjanya fungsi-fungsi institusi, integrasi factor-faktor kontekstual dalam setiap proses kebijakan, termasuk mendapat manfaat maksimal. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul ” Mengembangkan Tata Kelola Sumberdaya

Pariwisata Interaktif Berbasis IAD Untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Ramah Masyarakat Adat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor kunci/konstekstual apa yang mendukung keberhasilan pengembangan tatakelola sumberdaya pariwisata interaktif dalam kerangka IAD.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor kunci/konstekstual apa yang mendukung keberhasilan pengembangan tatakelola sumberdaya pariwisata interaktif dalam kerangka IAD

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengembangkan model tata kelola sumberdaya pariwisata interaktif berbasis IAD untuk mendukung pengembangan pariwisata yang ramah masyarakat adat. Penelitian dilakukan mono tahun, berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Tata Kelola Sumberdaya Pariwisata Interaktif Berbasis IAD Untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Ramah Masyarakat Adat.
 - b. Bagi peneliti lain, penelitian ini bermanfaat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang berbeda.
 - c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan model tata kelola sumberdaya pariwisata interaktif berbasis IAD untuk mendukung pengembangan pariwisata yang ramah masyarakat adat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Dewa G., Mangku L , Ni Putu R Y, Ruslan Ruslan , Seguito M	2022	<i>The Position Of Indegenous People In The Culture And Tourism Developments: Comparing Indonesia And East Timor Tourism Laws And Policies</i>	<i>This research found and confirmed that existing cultural arrangements were limited to the cultural identity of indigenous peoples and as a tourist attraction for Indonesia, but there are no regulations that give a definition of culture as an economic resource. In Timor Leste, Ecotourism management in Beloi Village is still far from the plan. The government as policy makers and facilitators impressed walk alone in terms of management tourist.</i>
2	Ortiz-Riomalo JF	2023	Fostering Collective Action Through Participation In Natural Resource And Environmental Management: An integrative and	<i>To fulfil this potential, the organisers and sponsors of PIs must address and link to the broader context through soundly designed and implemented processes. Complementary follow-up, enforcement and conflict resolution mechanisms are necessary to nurture, reassure and sustain understandings,</i>

			interpretative narrative review using the IAD, NAS and SES frameworks	<i>beliefs and preferences that undergird trust-building and collective action. The conceptual framework developed for the review can help researchers and practitioners further assess these insights, disentangle PIs' mechanisms and impacts, and integrate the research and practice of participatory governance and collective action.</i>
3	Duadji N, Tresiana N.	2016	Pemodelan dalam forum musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran.	Hasil penelitian (1) Diperlukan governance sounds berbasis lembaga adat Lampung dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa; (2) Input Musrenbang Desa harus berangkat dari persoalan (masalah) dan kebutuhan masyarakat desa dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman kondisi desa; (3) Konsep governance sounds lebih memaknai lembaga adat Lampung sebagai lembaga yang akomodatif terhadap pluralisme dan kemajemukan forum deliberatif desa; (4) Perlunya perubahan struktur dan orientasi untuk mensinergikan lembaga adat Lampung dan forum Musrenbang Desa; (5) Forum Lembaga Adat Lampung harus menjadi forum tertinggi Musrenbang Desa yang dilandasi oleh perda.
4	Abisono, F. G., Rini, T., & Sakro, A.	2020	The Commons dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam	Hasil kajian menemukan konflik pengelolaan <i>the commons</i> di Bleberan berakar dari formasi kewargaan yang kontestatif namun tanpa diimbangi kapasitas negosiasi secara memadai. Bangun sosial

			Desa Bleberan Gunungkidul	komunitarian warga berkelindan dengan kewargaan liberal yang cacat memunculkan eksklusif, ketidakesetaraan, dan pemusatan kesejahteraan. Sementara itu model republikan belum mampu tampil mengimbangi dominasi keduanya. Lemahnya kapasitas negosiasi atas keanggotaan, hak, dan beban tentang bagaimana <i>the commons</i> seharusnya dikelola berimplikasi pada kontestasi yang tidak terkelola.
5	Beny Octofryana Yousca Marpaung, Dwira Nirfalini Aulia, Eric Witarsa, Felicia Tania	2021	Evaluation of Tourism Policy Based on Local Knowledge: The Case of Lake Toba, Indonesia	The analysis of the evaluation of tourism development policies in this study found that the availability of supporting resources had not been allocated clearly. External conditions (social, economic, and political) hinder the implementation of local knowledge-based tourism policies effectively and optimally. In the future, this study should develop a mapping of local knowledge-based systems to establish a common understanding in the collective management of complex policy issues among stakeholders—mapping of local knowledge-based systems to support evaluation designs in sustainable tourism programs in the Lake Toba region.

Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2023)

2.2 *Institutional analysis development (IAD)*

2.2.1 Pengertian

Institutional analysis development (IAD) digunakan sebagai kerangka pemecahan masalah untuk mengatasi konflik tatakelola sumberdaya pariwisata, akibat kegagalan institusional dalam konteks perumusan kebijakan. Kinerja IAD diukur bagaimana masyarakat lokal adat sebagai subyek mendapat manfaat serta fungsi institusional bekerja (Gyan,2022).

Institutional Analysis and Development (IAD) adalah sebuah kerangka pemecahan masalah yang digunakan dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosial untuk menganalisis konflik dan masalah yang timbul dari kegagalan institusional (Dewa,2022). IAD didasarkan pada teori ekonomi institusional yang menekankan pentingnya institusi dalam membentuk perilaku dan keputusan individu serta kelompok dalam masyarakat.

Dalam konteks tatakelola sumberdaya pariwisata, konflik sering muncul karena perbedaan kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, pengusaha pariwisata, organisasi non-pemerintah, dan wisatawan. Konflik ini dapat timbul karena kegagalan dalam perumusan kebijakan, regulasi, atau implementasi program yang berhubungan dengan pariwisata. IAD dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami akar permasalahan tersebut serta menawarkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2.2.2 Faktor-faktor interaksi dan dinamis IAD

Sebagai sebuah kerangka analisis, IAD bersifat interaktif dan dinamis, pendekatan multi-aktor dan model analisis pengembangan kelembagaan. Faktor-faktor interaksi dan dinamis dimulai dari:

- 1) *Factor eksogenous* sebagai gabungan tiga faktor: karakteristik sumber daya alam (SDA) dan pengguna, tata kelola termasuk *rule in use* yang menentukan penggunaan SDA di lapangan. Untuk setiap faktor dinilai bagaimana dapat membentuk insentif bagi tindakan kolektif menuju tujuan yang ditetapkan;
- 2) Faktor eksogenous mempengaruhi arena aksi tempat tindakan para aktor, yaitu panggung/ruang konseptual yang dipilih untuk bekerjasama/tidak yang meliputi: situasi aksi, dan para partisipan yang berinteraksi dalam situasi aksi membentuk pola interaksi;
- 3) Pola interaksi terbentuk, menentukan *kinerja (outcome)* yang dihasilkan dalam bentuk masyarakat lokal adat sebagai subyek dan mendapat manfaat, fungsi institusional dapat bekerja. Pendekatan ini memungkinkan memasukkan faktor-faktor kontekstual sesuai kondisi di lapangan, yang dinamis, sehingga kinerja pada gilirannya akan memberi umpan balik ke dalam dan memengaruhi konteks serta arena tindakan di putaran berikutnya.

2.2.3 Konflik Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan merupakan suatu benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan cara pandang, kepentingan, nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan/keterbatasan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Falk, 2019).

Tidak harus selalu perlu ditetapkan adanya peraturan untuk mengatur arena aksi dalam munculnya konflik karena biasanya, tidak ada aturan tunggal atau konsisten yang mengatur arena aksi. Sebaliknya, ada pluralisme hukum – koeksistensi dari berbagai jenis aturan: hukum internasional, nasional, adat dan agama, peraturan proyek, norma-norma lokal, dan bahkan pedoman sukarela atau tanggung jawab sosial perusahaan standar – masing-masing didukung oleh kerangka kerja kelembagaan yang berbeda. Aktor yang berbeda akan menarik seperangkat aturan yang berbeda, tergantung di mana mereka mengetahui lembaga mana yang mereka akses, dan yang mereka berpikir akan mendukung kepentingan mereka untuk membenarkan tindakan mereka. Untuk mencegah konflik ini mereka membutuhkan aturan yang lebih tinggi dari yang berwenang untuk membenarkan aturan yang mereka buat.

Karakteristik sumberdaya alam merupakan aset tidak berwujud dan berwujud yang memberi para aktor kemampuan untuk agensi. Agensi mencakup kemampuan untuk melaksanakan pilihan mata pencaharian, untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif di berbagai tingkatan, untuk mempengaruhi aktor lain, atau dapatkan terlibat dalam proses politik. Semua jenis aset yang berbeda dapat

dipertimbangkan sumber daya tindakan. Karakteristik ini meliputi mudah tidaknya sumberdaya alam itu diregulasi, biaya transaksi dan biaya ekslusi.

Karakteristik pengguna sumberdaya alam merupakan Aktor dapat berupa individu atau entitas kolektif, seperti organisasi, misalnya departemen pemerintah, entitas negara lain, perusahaan swasta, atau LSM. Aktor internal adalah mereka yang diharapkan mengikuti sistem aturan khusus itu muncul dari tawar-menawar institusional, sedangkan aktor eksternal dapat mempengaruhi proses tawar-menawar institusi yang mendefinisikan sistem aturan untuk aktor lain, tetapi tidak harus terikat oleh hasilnya. Karakteristik ini meliputi perbedaan sosial ekonomi, profesi yang saling berpengaruh, modal sosial, aset properti, dan kondisi sosial terkait perhatiannya terhadap resiko (Falk, 2019).

Kerangka kerja *Institutional Analysis Development* (IAD) adalah kerangka kerja yang telah mapan dan kuat yang menekankan kepada analisis pengaruh peraturan terhadap pengambilan keputusan dan tindakan individu atau organisasi. Konsep ini juga menentukan perilaku manusia dalam arena aksi kehidupannya bukan teks peraturan (*rule in form*), tetapi bagaimana peraturan itu bekerja mempengaruhi dunia nyata yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain (*rule in use*). Faktor-faktor lain itu di antaranya pengetahuan mengenai peraturan ataupun sumber daya yang dimiliki seperti kekayaan, jabatan, informasi, pengetahuan, ketokohan, dan sebagainya. Penyebab penegakan hukum dan pengawasan terhadap kerusakan/pencemar lingkungan yang seringkali tidak berjalan karena biasanya disebabkan oleh tidak bekerjanya peran negara dan rendahnya ketertiban. Namun dengan konsep IAD dapat disarankan antara lain :

- 1) Kerusakan lingkungan ini bukan hanya akibat lemahnya peran negara namun keberadaan dari sistem dalam negara itu sendiri yang menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi.
- 2) Mencegah terjadinya eksklusivisme dalam pengelolaan sumberdaya alam.
- 3) Monitoring yang ketat terhadap pemberi ijin dan pengawas dengan penerapan sanksi etika dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.2.4 Langkah-Langkah Rinci Dalam Menerapkan Kerangka Iad Untuk Mengatasi Konflik Tatakelola Sumberdaya Pariwisata

Berikut adalah langkah-langkah rinci dalam menerapkan kerangka IAD untuk mengatasi konflik tatakelola sumberdaya pariwisata:

1. Identifikasi pemangku kepentingan (*stakeholders*): Identifikasi semua aktor yang terlibat dalam industri pariwisata di wilayah tersebut. Ini termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat lokal, pengusaha pariwisata, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.
2. Analisis institusional: Tinjau dan analisis kebijakan, regulasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang ada terkait pariwisata. Identifikasi kelebihan dan kelemahan dari institusi-institusi tersebut dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap konflik atau kegagalan dalam tatakelola sumberdaya pariwisata.
3. Identifikasi konflik: Identifikasi sumber-sumber konflik yang ada di sekitar tatakelola pariwisata, seperti konflik atas pemanfaatan sumber daya

alam, distribusi manfaat ekonomi, ketegangan budaya, dampak lingkungan, dan lain-lain.

4. Analisis biaya dan manfaat: Tinjau dampak dari konflik dan kegagalan institusional pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Analisis biaya dan manfaat dari berbagai kebijakan atau solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah-masalah ini.
5. Identifikasi alternatif kebijakan: Berdasarkan hasil analisis, identifikasi alternatif kebijakan atau mekanisme institusional yang dapat mengatasi konflik dan kegagalan institusional. Alternatif-Alternatif ini harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan terlibat.
6. Evaluasi alternatif kebijakan: Evaluasi potensi efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang dari setiap alternatif kebijakan yang diusulkan. Pilih solusi yang paling sesuai dengan situasi lokal dan mampu mengatasi akar permasalahan.
7. Implementasi: Implementasikan kebijakan atau mekanisme institusional yang dipilih secara hati-hati. Pastikan ada pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi kinerja implementasi.
8. Penyesuaian: Selama proses implementasi, kemungkinan masih muncul masalah atau tantangan baru. Lakukan penyesuaian kebijakan dan mekanisme institusional jika diperlukan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman implementasi.

Melalui penerapan kerangka IAD, diharapkan konflik tatakelola sumberdaya pariwisata yang diakibatkan oleh kegagalan institusional dapat

diatasi, sehingga pariwisata dapat berkontribusi secara lebih berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial wilayah tersebut tanpa merusak lingkungan dan budaya setempat.

2.3. Pariwisata Yang Ramah Masyarakat Adat

Pariwisata yang ramah terhadap masyarakat adat adalah suatu pendekatan dalam industri pariwisata yang menghargai dan menghormati budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat adat yang tinggal di destinasi wisata. Tujuan dari pariwisata yang ramah masyarakat adat adalah untuk memastikan bahwa keberadaan dan pengembangan pariwisata tidak merusak, melanggar, atau mengabaikan hak-hak masyarakat adat, tetapi justru memberikan manfaat bagi mereka.

Pendekatan pariwisata yang ramah terhadap masyarakat adat merupakan suatu strategi dalam industri pariwisata yang menempatkan masyarakat adat sebagai pusat perhatian. Pendekatan ini bertujuan untuk menghargai dan menghormati budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat adat yang tinggal di destinasi wisata. Melalui pendekatan ini, pariwisata diupayakan agar tidak merusak, melanggar, atau mengabaikan hak-hak masyarakat adat, melainkan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mereka.

Salah satu aspek kunci dari pendekatan pariwisata yang ramah masyarakat adat adalah penghargaan terhadap budaya dan tradisi. Wisatawan diajak untuk menghormati warisan budaya masyarakat adat, termasuk adat istiadat, bahasa, seni, dan praktik spiritual. Masyarakat adat dihargai sebagai penjaga tradisi dan

kearifan lokal, sehingga para wisatawan diharapkan untuk tidak menyakiti atau mengeksploitasi mereka dalam kunjungan wisata.

Selain itu, pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan pariwisata. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan industri pariwisata di wilayah tempat tinggal mereka. Dengan demikian, kepentingan dan aspirasi masyarakat adat dapat diakomodasi dengan baik dalam pengembangan pariwisata.

Pariwisata yang ramah masyarakat adat melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan destinasi pariwisata. Masyarakat adat dihargai sebagai pemangku kepentingan penting dalam industri pariwisata, dan pihak-pihak terkait berusaha untuk bekerja sama dengan mereka dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan atraksi wisata, dan pengembangan program pariwisata.

Pariwisata yang Ramah Masyarakat Adat merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam industri pariwisata saat ini. Dalam upaya untuk melindungi dan menghormati budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat adat di destinasi pariwisata, pendekatan ini menekankan pada keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat adat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi. Melalui penghargaan terhadap kebudayaan lokal, pemberian manfaat ekonomi yang adil, serta konservasi lingkungan dan sumber daya alam, pariwisata yang ramah masyarakat adat bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat adat dan lingkungan setempat. Melibatkan masyarakat adat dalam

pengambilan keputusan dan memastikan pembagian manfaat yang merata merupakan langkah kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian warisan budaya yang tak ternilai. Dengan pendekatan yang berkelanjutan ini, pariwisata dapat menjadi sarana yang positif dan berdaya guna bagi masyarakat adat, sambil tetap melestarikan identitas dan keunikan budaya mereka.

Aspek lain yang penting adalah konservasi lingkungan dan sumber daya alam. Pariwisata yang ramah masyarakat adat berupaya untuk menjaga keberlanjutan destinasi wisata dengan melestarikan lingkungan alam dan sumber daya alam yang menjadi tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat adat. Melalui upaya konservasi, destinasi wisata diharapkan dapat tetap menarik bagi para wisatawan jangka panjang.

Selain menghargai budaya dan lingkungan, pendekatan pariwisata yang ramah masyarakat adat juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Upaya ini mencakup berbagai langkah seperti pelatihan, kesempatan kerja, dan pengembangan usaha mikro atau kecil yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Dengan demikian, masyarakat adat dapat merasakan manfaat ekonomi yang positif dari pariwisata tanpa mengorbankan identitas budaya mereka.

Terakhir, pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran bagi para wisatawan. Edukasi tentang adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat adat penting untuk mencegah ketidakpahaman dan penghinaan. Dengan mengetahui etika perjalanan dan bagaimana berinteraksi dengan

masyarakat adat secara menghormati, wisatawan dapat berkontribusi secara positif terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat adat di destinasi wisata.

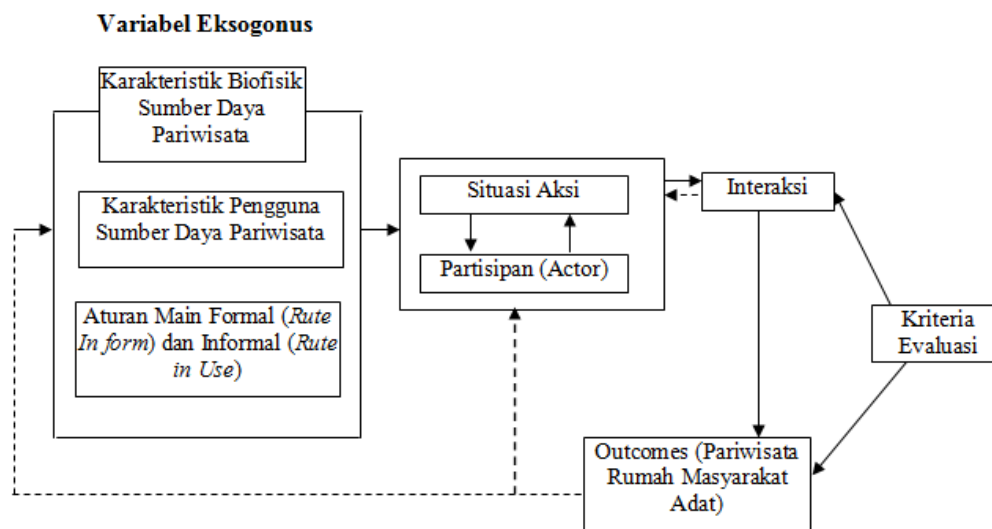
Secara keseluruhan, pendekatan pariwisata yang ramah masyarakat adat bertujuan untuk menciptakan hubungan simbiosis antara industri pariwisata dan masyarakat adat. Dengan memprioritaskan keberlangsungan budaya, lingkungan, dan ekonomi masyarakat adat, pendekatan ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

2.4. Kerangka Penelitian

Model kebijakan tatakelola sumber daya bersama sebelumnya dikritik, banyak menimbulkan konflik dan kegagalan kebijakan (Muliono,2022). IAD, sebagai pendekatan baru, mengkoreksi model sebelumnya dengan mengatur kegiatan analisis kebijakan yang kompatibel baik dalam ilmu *science* dan sosial (Falk, 2019). IAD tidak menggantikan metode, namun menyediakan sarana mensintesis factor-faktor dari aktor yang terlibat langsung dalam situasi kebijakan dan memiliki kepentingan jangka panjang dalam hasil kebijakan. Prioritas pendekatan pada kekuatan local adat dengan strategi pemetaan sosial, memberi perspektif kepada masyarakat bagaimana mereka melihat penggunaan sumberdaya saat ini dan yang akan datang, dengan tetap memperhatikan kebutuhan yang diperlukan.

Studi Polski dan Ostrom (2023), IAD sukses digunakan secara empiris pada studi layanan kepolisian, berkembang pada studi menganalisis sumber daya

bersama. Dalam konteks sumberdaya bersama, IAD telah diterapkan pada studi kasus individu dilakukan oleh sejarawan, sosiolog, pertanian, politik, antropolog, dan ilmu lingkungan. Fokus bahasan mengkaji desain yang mencirikan institusi yang kuat dan mandiri untuk mencapai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya IAD sukses digunakan di sector irigasi dan kehutanan, focus desain pengetahuan dan informasi tentang bagaimana kelembagaan mempengaruhi insentif pengguna hutan dan menghasilkan tingkat deforestasi yang substansial di beberapa lokasi. Studi empiris [analisis kebijakan IAD di negara-negara maju menunjukkan fungsionalitas IAD pada sector-sektor sebagai berikut: 1) isu-isu pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur, privatisasi, kebijakan fiskal, alokasi kredit, layanan kesehatan dan manusia, dan pengelolaan sumber daya; 2) Pengelolaan sumber daya bersama termasuk hutan, perikanan, irigasi, sumber daya air; 3) Layanan dan tata kelola publik local, bagian dan nasional; 4) Desain konstitusionil dan Hubungan internasional (Beny,2021).



Gambar 2.1 Kerangka fikir penelitian
(Adaptasi IAD *Framework* Polski dan Ostrom, 2023)

Analisis situasi aksi pada penelitian dilakukan analisis dengan mengidentifikasi siapa saja (aktor) yang turut serta dalam kelembagaan adat Tiyuh Panaragan dan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan dan bagaimana tugas dan kewenangan dari setiap aktor. Pada analisis selanjutnya, dilakukan penilaian apakah tugas dan kewenangan yang telah disepakati dilaksanakan oleh para aktor yang turut serta dalam kelembagaan adat Tiyuh Panaragan dan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan model pemetaan sosial dengan jenis *Participatory Rural Appraisal* (PRA) (Bambang,2019). Langkah-langkahnya:

1. **Analysis**: Melakukan identifikasi dan analisis potensi, masalah, kebutuhan, tinjauan kebijakan sehingga menghasilkan *output* karakteristik sumberdaya & penggunaan, proses interaksi arena aksi, tatakelola/aturan main formal dan informal, arena aksi sebagai panggung perundingan, kinerja yang berdampak masyarakat adat;
2. **Design** : Langkah yang dilakukan adalah merumuskan pengembangan insentif setiap factor untuk tindakan korektif guna mencapai tujuan bersama yang *specific, measurable, aplicable* dan *realistic*. Selanjutnya menyusun instrument-instrumen, didasarkan pada tujuan pengembangan yang telah dirumuskan dengan strategi pengembangan dan kerangka kerja yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut;
3. **Development**: Pengembangan yaitu proses mewujudkan *blue-print* atau model menjadi kenyataan. Dalam hal ini model kebijak tata kelola sumberdaya integratif berbasis IAD;
4. **Implementation** : Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan model tatakelola sumberdaya interaktif yang dibuat. Pada tahap implementasi dituangkan dalam kerangka implementasi;

5. **Evaluation** : Evaluasi merupakan proses melihat apakah model kerangka kerja yang sedang dibangun berhasil atau tidak

3.2. Subjek dan Lokasi

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dikhususkan pada Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Tulang Bawang Tengah. Ke-2 wilayah pusat perkembangan budaya dan merupakan kawasan pariwisata budaya daerah berdasarkan ketetapan daerah, otoritas marga/adat dan kelembagaan hukum adat berjalan, didukung oleh potensi wisata alam, pertanian dan perkebunan, kuliner.

Sampel penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas masyarakat local, komunitas masyarakat adat, kelompok swasta, kelompok pengamat dan peneliti, LSM. Sampel diambil secara *purposive sampling*

3.3. Instrumen Penelitian

Menggunakan angket survei, FGI, FGD, pedoman wawancara, dokumentasi, observasi sebagai berikut:

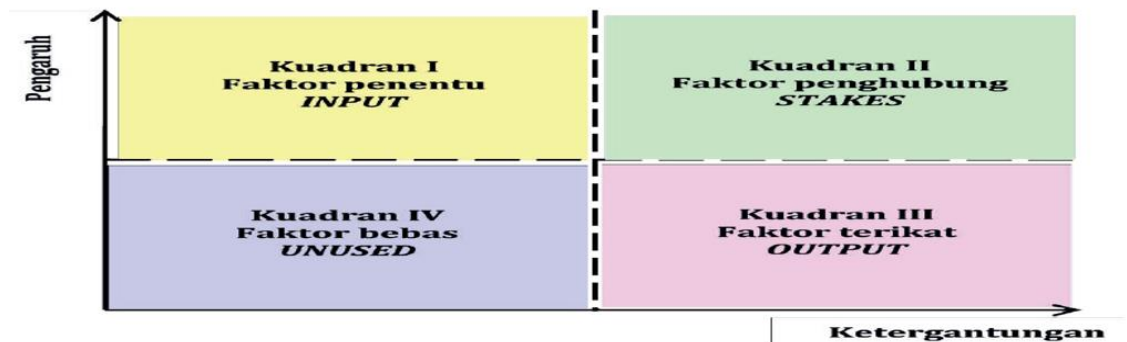
1. Survei *need assessment stakeholders (terutama masyarakat adat) dan factor-faktor IAD* dikembangkan sendiri oleh peneliti. Instrumen yang akan diisi oleh informan/responden secara offline;
2. Protokol *Focus Group Interview (FGI)* dikembangkan sendiri oleh peneliti. Instrumen yang akan diisi ketika berlangsungnya FGI ini;

3. Protokol Pedoman Wawancara dikembangkan ada dua macam, yaitu:
Pedoman wawancara untuk memperoleh factor-faktor *IAD* melalui *tematik activity*. Mendapatkan informasi detail mengenai proses kebijakan dan agenda kebijakan yang selama ini berlangsung apakah beorientasi *IAD*;
4. Lembar observasi yang dikembangkan berupa lembar observasi terhadap tindakan desain pengambilan keputusan selama implementasi pengembangan. Lembar observasi akan berisi daftar *check* terhadap peran stakeholders-masyarakat adat dan fungsi-fungsi kelembagaan;
5. FGD digunakan untuk penentuan tema, insentif factor perubahan, menyusun skema perubahan;
6. Dokumentasi dipergunakan melakukan tinjauan kebijakan/peraturan

3.4. Tehnik Analisis Penelitian

Pengolahan data dilakukan dengan analisis multi kriteria, yaitu :

1. Analisis Uji Prospektif **meliputi:**
 - (a) Penetapan factor kunci dari sistem pengembangan tatakelola sumberdaya interaktif dengan melalui kuadran pengaruh dan keterhubungan antar factor



- (b) Menentukan tujuan strategis dan kepentingan utama para *stakeholder*, terutama masyarakat adat yang terkait dengan sistem yang dikaji.
- (c) Menentukan pengaruh langsung antarfaktor dalam sistem, yang dilakukan pada tahap pertama analisis prospektif menggunakan matriks pengaruh langsung antarfaktor dalam pengembangan tatakelola sumberdaya

Dari Terhadap →			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A			■									
B				■								
C					■							
D						■						
E							■					
F								■				
G									■			
H										■		
I											■	
J												■

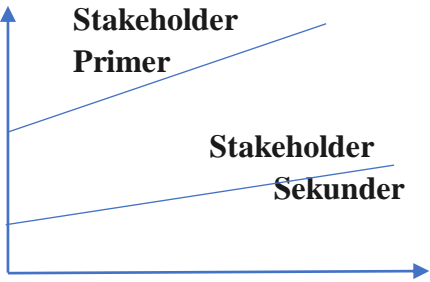
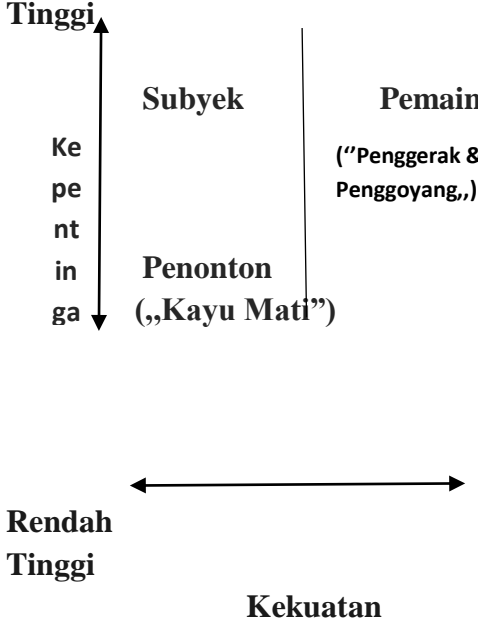
- (d) Mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan, melalui identifikasi bagaimana elemen kunci berubah, memeriksa

perubahan dan menggambarkan skenario dan implikasinya terhadap sistem menentukan faktor kunci penentu untuk masa depan dari sistem yang di kaji.

- (e) Menentukan keadaan (*state*) suatu factor;
- (f) Membangun skenario dan merumuskan implikasi skenario dalam bentuk menyusun rekomendasi kebijakan dari implikasi yang sudah disusun

2. Uji need Assesment

Pengelompokan stakeholders dalam kuadran stakeholders kepentingan dan pengaruh, untuk melihat kebutuhan untuk melihat kebutuhan stakeholder terhadap tatakeola sumberdaya pariwisata (Demetris,2022).

 <p>Stakeholder Primer</p> <p>Stakeholder Sekunder</p> <p>Stakeholder eksternal</p>	 <p>Tinggi</p> <p>Kepe nt in ga</p> <p>Subyek</p> <p>Pemain („Pengerak & Penggoyang,‘)</p> <p>Penonton („Kayu Mati“)</p> <p>Rendah</p> <p>Tinggi</p> <p>Kekuatan</p>
<p>Gambar 4: Kategori <i>stakeholder</i> berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan</p>	<p>Gambar 5: <i>Stakeholder grid</i></p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tulang Bawang Barat memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata berkat kekayaan alam dan budayanya. Dalam pengembangan pariwisata di daerah ini, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang beragam.
2. Pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan industri pariwisata merupakan pemangku kepentingan utama yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi aktif dari ketiga kelompok ini menjadi kunci untuk merancang kebijakan dan program pariwisata yang efektif dan berkelanjutan.
3. Dalam upaya pengembangan pariwisata, penting untuk memprioritaskan pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kualifikasi dan kesempatan kerja di sektor pariwisata.
4. Permintaan wisatawan untuk akomodasi berkualitas, kegiatan ekowisata, dan informasi yang lebih baik tentang atraksi dan budaya lokal harus dipertimbangkan dalam pengembangan produk dan layanan pariwisata.
5. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, industri pariwisata, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting dalam menciptakan produk dan paket wisata yang menarik dan berkesan.

6. Konservasi lingkungan dan keberlanjutan pariwisata harus diutamakan untuk menjaga keindahan alam dan budaya di Tulang Bawang Barat agar tetap menarik bagi wisatawan.

5.2 Saran

Beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini antara lain:

1. Meningkatkan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberikan pelatihan keterampilan, dan memastikan mereka mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari industri pariwisata.
2. Fokus pada peningkatan kualitas layanan di akomodasi, restoran, dan objek wisata. Melatih tenaga kerja pariwisata dalam pelayanan yang ramah, profesional, dan berorientasi pada kepuasan wisatawan.
3. Mengadopsi teknologi pariwisata untuk mempermudah akses informasi dan pemesanan bagi wisatawan. Memanfaatkan media sosial dan pemasaran digital untuk mempromosikan destinasi dan atraksi wisata.
4. Mendorong kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, industri pariwisata, dan organisasi non-pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan mempromosikan pariwisata di Tulang Bawang Barat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Anna S. (2003). Model Embedded Dinamik Ekonomi Interaksi Perikanan-Pencemaran. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Damai, A. A., Boer, M., Damar, A., & Rustiadi, E. (2011). Analisis Prospektif Partisipatif dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Lampung
- Fauzi A. (2010). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Godet M. (1999). Scenarios and Strategies, A Toolbox for Scenario Planning. Paris (FR): Librairie des Arts et Meiers
- Hardjomidjojo, H. (2002). Metode analisis prospektif. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Marimin. (2004). Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- McLoughlin JB. (2010). Urban and Regional Planning a System Approach. London: Faber and Faber.
- Nugroho. I. (2015). Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rustiadi E, Saefulhakim S, dan Panuju DR. (2009). Perencanaan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Wiryanawan B, Marsden B, Susanto HA, Mahi AK, Ahmad M, dan Poespitasari H (Tim Editor). (1999). Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung. Bandar Lampung: Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Proyek Pesisir Lampung

b. Jurnal

- Abisono, F. G., Rini, T., & Sakro, A. (2020). The Commons dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa Bleberan Gunungkidul. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, (2020). 6(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.422>.
- Ana M, Inmaculada G. (2022). Benefits of policy actor embeddedness for sustainable tourism indicators' design: the case of Andalusia. Journal of Sustainable Tourism. 2022. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.2024551>

- Anna C, Lisa R, Michelle W. (2016). Indigenous peoples and tourism: the challenges and opportunities for sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*. 2:1067-1079. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1206112>.
- Bambang H, et al. (2019). Participatory rural appraisal (PRA) untuk pengembangan desa wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Jurnal Bakti Budaya*. 2019; 2(2): 99-112. <http://dx.doi.org/10.22146/bb.50890>
- Beny OYM, Dwira NA, Eric W, Felicia T. (2021). Evaluation of tourism policy based on local knowledge: the case of lake Toba, Indonesia. *Hong Kong Journal Of Social Sciences*. 2021;58:543-533.
- Butler, R. (2021). Research on Tourism, Indigenous Peoples and Economic Development: A Missing Component. *Land* 2021, 10, 1329. <https://doi.org/10.3390/land10121329>
- Demetris VMC, Elisa G, Francesca S. (2022). Sustainable development in tourism: a stakeholder analysis of the langhe region. *Journal of Hospitality & Tourism Research*. 2022;46(5) : 1-33. <https://doi.org/10.1177/1096348020982353>
- Dewa G., Mangku L, Ni Putu R Y, Ruslan Ruslan, Seguito M. (2022) The Position Of Indigenous People In The Culture And Tourism Developments: Comparing Indonesia And East Timor Tourism Laws And Policies. *Journal Of Indonesian Legal Studies*, 2022. (1). 57-100. <http://dx.doi.org/10.15294/jils.v7i1.52407>.
- Edward AK. (2016) The three institutionalisms and institutional dynamics: understanding endogenous and exogenous change. *Journal of Public Policy*. 2016;36(4):639-664. <https://doi.org/10.1017/S0143814X15000240>
- Elinor Ostrom. (2021). *The Institutional Analysis and Development Framework and the Commons*, 95 *Cornell L. Rev.* 807. 202. .
- Falk D. (2019). Policy analysis in the face of complexity: what kind of knowledge to tackle wicked problems; *Public Policy and Administration*. 2019; 34(1): 62-83. <https://doi.org/10.1177/0952076717733325>.
- Gyan PN, Surya P, Abigail Y. (2022). Governance Of Protected Areas: An Institutional Analysis Of Conservation, Community Livelihood, And Tourism Outcomes. *Journal Of Sustainable Tourism*. 2022; 30(11):2686-2705.
- IDS Knowledge, (2016). *Technology, Society Team. Understanding Policy Process, A review of IDS Research on the Environment*. Brighton, UK: Institute of Development Studies, University of Sussex. 2006.

- Jonathan JP, Leanne SG, Holly LP, Katherine CH.(2020). Common approaches for studying advocacy: review of methods and model practices of the advocacy coalition framework. 2020;139-158. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2019.06.005>
- Mardle S, Bennett E, Pascoe S. (2003). Multiple criteria analysis of stakeholder opinion: a fisheries case study. Centre for the Economics and Management of Aquatic Resources, University of Portsmouth. UK. 2003.
- Muhammad S., Rahman, David S, Michael C. Shone & Nazmun N. Ratna.(2021). Social and cultural capitals in tourism resource governance: the essential lenses for community focussed co-management, 2021, Journal of Sustainable Tourism, <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1903016>
- Muliono.(2022) Praktik Ruang Dan Pembangunan Desa Adat: Proyeksi Ke Sebuah Model. Journal of social outreach, 2022 1 (1), 1-13.
- Noverman, D., & Novita, T. (2020). Sustainable Tourism: Why Do Government Need Collaborative Governance?. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 2020 107(11), 177-182. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-11.21>
- Ortiz-Riomalo JF,(2023). Koessler AK, Engel S. Fostering Collective Action Through Participation In Natural Resource And Environmental Management: An integrative and interpretative narrative review using the IAD, NAS and SES frameworks. Journal of Environmental Management. 2023. 331. Error! Hyperlink reference not valid..
- Polski MM and Ostrom E.(2023). An Institutional Framework for Policy Analysis and Design diakses 2 april 2023. <https://ostromworkshop.indiana.edu/pdf/teaching/iad-for-policy-applications.pdf>
- Ram R, (2022), Optimal restoration of common property resources under uncertainty. Resource Policy. 2022 Vol 77 (0). 102688. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102688>.
- Sutresna, Made IB ; Saskara, Nyoman IA; Utama, Suyana IM ; Setyari, Wiwin NP.(2021). Prospective Analysis in Determining Community Based Sustainable Tourism Development Policies in Penglipuran Tourism Village, Bali. 2021. 20. 1-13.
- Tolga BH, Deniz Y.(2022). Institutions in the politics of policy change: who can play, how they play in multiple streams. Journal of Public Policy. 2022.;42:509–528. <https://doi.org/10.1017/S0143814X2100026X>

Tresiana N, dan Duadji N. (2018). Tata kelola pariwisata teluk kiluan berkelanjutan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tresiana N, Duadji N. (2016). Multi stakeholders governance body model in achieving the excellence public policy. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 2016;32(2):401-411.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1879>

Tresiana, N., Duadji, N.(2022) Developing forest coffe cultural tourism and historical heritage megalitic sites in social innovation governance: how does it work in a sustainable way. *Journal of Environmental Management and Tourism*. 2022; 13(4):1036-1046.
[https://doi.org/10.14505/jemt.v13.4\(60\).10](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.4(60).10)